

AKUNTANSI DAN KONFLIK POLITIK EKONOMI: LAPORAN KEUANGAN UNTUK MEMENUHI TUJUAN POLITIK EKONOMI

Tresno Lesmono

Akademi Akuntansi YKPN

email: iredyk@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Akuntansi sebagai alat komunikasi harus mengekspresikan hubungan antara anggota kelompok yang saling berkait. Sebagai mediator untuk kelompok ekonomi, akuntansi harus mampu menghasilkan laporan yang mengurangi konflik antara kepentingan kelompok. Laporan keuangan untuk ekonomi politik berguna untuk menyatukan dalam level wilayah maupun nasional. Laporan yang mengandung nilai tambah adalah salah satu format yang sesuai dengan ekonomi politik

Keywords: Politik ekonomi, teori akuntabilitas, distribusi ekonomi, Laporan nilai tambah.

PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan alat komunikasi yang menggunakan ukuran-ukuran moneter mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan dengan alat komunikasi lain. Kelebihan ini misalnya dapat menggambarkan secara akurat besaran distribusi ekonomi yang lebih dapat dipahami oleh masyarakat umum. Kelebihan lain adalah bahwa akuntansi telah disetel untuk menghasilkan laporan secara periodik. Bahkan pada teknologi saat ini laporan dapat dihasilkan setiap saat.

Dengan kelebihan seperti itu akuntansi diharapkan mempunyai andil dalam mengurangi konflik dalam kegiatan ekonomi dengan menyediakan informasi yang adil dan terbuka. Sebagai produk jasa modern, akuntansi mempunyai peluang besar untuk menjadi alat mediasi. Akuntansi yang pada mulanya merupakan alat komunikasi interen perusahaan telah berkembang menjadi alat komunikasi antar perusahaan, akhirnya menjadi alat komunikasi sosial yang melibatkan tidak hanya institusi bisnis tetapi juga institusi non-bisnis baik pemerintah dan non pemerintah (Hopwood, 1983).

Politik ekonomi merupakan pembauran dari ilmu ekonomi dan ilmu politik. Pembauran tersebut dapat didekati dari salah satu ilmu, dari ilmu politik dan dari ilmu ekonomi. Bila analisis bersumber dari teori ekonomi untuk memahami permasalahan politik maka disebut ekonomi politik atau *the economic theory of politics*. Bila analisis dilakukan pendekatan berasal dari teori politik untuk memahami masalah ekonomi maka disebut politik ekonomi atau *the political theory of economics* (Kuntjoro Jakti, 1999). Ilmu ekonomi berusaha untuk menjelaskan kegiatan manusia dalam membuat pilihan-pilihan untuk menghadapi keterbatasan (*scarcity*) dalam upaya mencapai hasil optimal untuk memuaskan pelaksanaan kegiatannya. Pembicaraan ilmu ekonomi tersebut dalam tataran individual. Apabila

pembicaraan ada pada tataran grup atau golongan maka akan menyangkut tiga masalah yaitu mobilisasi berbagai sumber, alokasi sumber daya dan distribusi sumberdaya. Pemilihan arah kebijakan ekonomi inilah yang disebut Politik Ekonomi (Political Economy).

Sebagai akibat dari dilakukannya ketiga kegiatan tersebut maka muncullah masalah tukar menukar (trade-off) nilai antara berbagai pilihan yang selalu menimbulkan kompetisi dan konflik karena dalam kegiatan ekonomi manapun selalu ada pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan (Kuntjoro Jakti, 1999). Kompetisi dan konflik merupakan potensi ketidak stabilan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam masyarakat ekonomi. Keduanya harus dikelola dengan tepat agar tidak menimbulkan bencana sosial yang luas. Bentuk penanganannya adalah dengan menciptakan sistem yang demokratis. Komunikasi sosial yang dilaksanakan secara efektif diperlukan dalam pengelolaan kompetisi dan konflik tersebut. Komunikasi sosial yang dimaksud harus secara spesifik menunjukkan distribusi yang adil.

Peran akuntansi dalam memberikan sumbangan di kancah politik ekonomi sebenarnya merupakan pertanggung jawaban akuntansi kepada masyarakat. Tanggung jawab ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab sosial yang melekat sejak perusahaan berdiri di tengah-tengah masyarakat. Kesadaran dari orang-orang dalam perusahaan sendiri yang mendorong pemenuhan kewajiban perusahaan secara bersama-sama memberi peluang pada masyarakat untuk menilai mobilisasi, alokasi dan distribusi sumberdaya di masyarakat bisnis.

Makalah ini berusaha mengungkap latar belakang politik ekonomi yang diperlukan sehingga akuntansi mampu menempatkan diri sebagai bagian penting dalam kancah politik ekonomi yang dipilih. Pengungkapan ini diperlukan agar bila akuntansi belum disiapkan untuk mendukung politik ekonomi maka harus disediakan suatu sistem yang mendukung. Akuntansi yang berwawasan politik ekonomi harus menyiapkan seperangkat laporan yang dapat dijadikan jembatan komunikasi antar golongan ekonomi. Untuk sampai kepada permasalahan di atas maka digunakan sebuah kerangka teori yaitu teori akuntabilitas perusahaan.

TEORIAKUNTABILITAS

Konsep akuntabilitas perusahaan mempunyai beberapa akar dan cabang. Konsep dasar yang penting adalah gagasan mengenai legitimasi organisasi (Benston, 1982). Konsep dasar ini menyatakan bahwa suatu lembaga yang bertujuan memiliki dan menggunakan kekuasaan praktis yang mengandung unsur keinginan dan perilaku orang-orang, harus bertanggung jawab untuk tujuannya tidak hanya kepada lembaga itu saja, tetapi harus bertanggung jawab kepada lingkungannya. Konsep ini mewajibkan perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Akar lain dari konsep akuntabilitas perusahaan adalah konsep ekuiti atau keadilan yang dijabarkan dari asumsi bahwa perusahaan yang didirikan akan “melukai” orang-orang yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Akibat langsung dari konsep ini adalah kewajiban melakukan pengungkapan (disclosure) atas segala sesuatu yang diperlukan oleh peraturan yang dicakup dalam standar akuntansi. Kewajiban mengungkap informasi keuangan dimaksudkan agar masyarakat mempunyai petunjuk yang cukup untuk mengambil keputusan. Ini berarti bahwa teori akuntabilitas juga menghasilkan teori stewardship (kepengurusan).

Eksistensi akuntabilitas perusahaan muncul bila kepentingan perusahaan bersinggungan dengan kepentingan pihak lain. Padahal perusahaan selalu berhubungan dengan dengan pihak lain dan selalu bersinggungan kepentingan dengan pihak lain tersebut. Pada situasi yang paling sederhana,

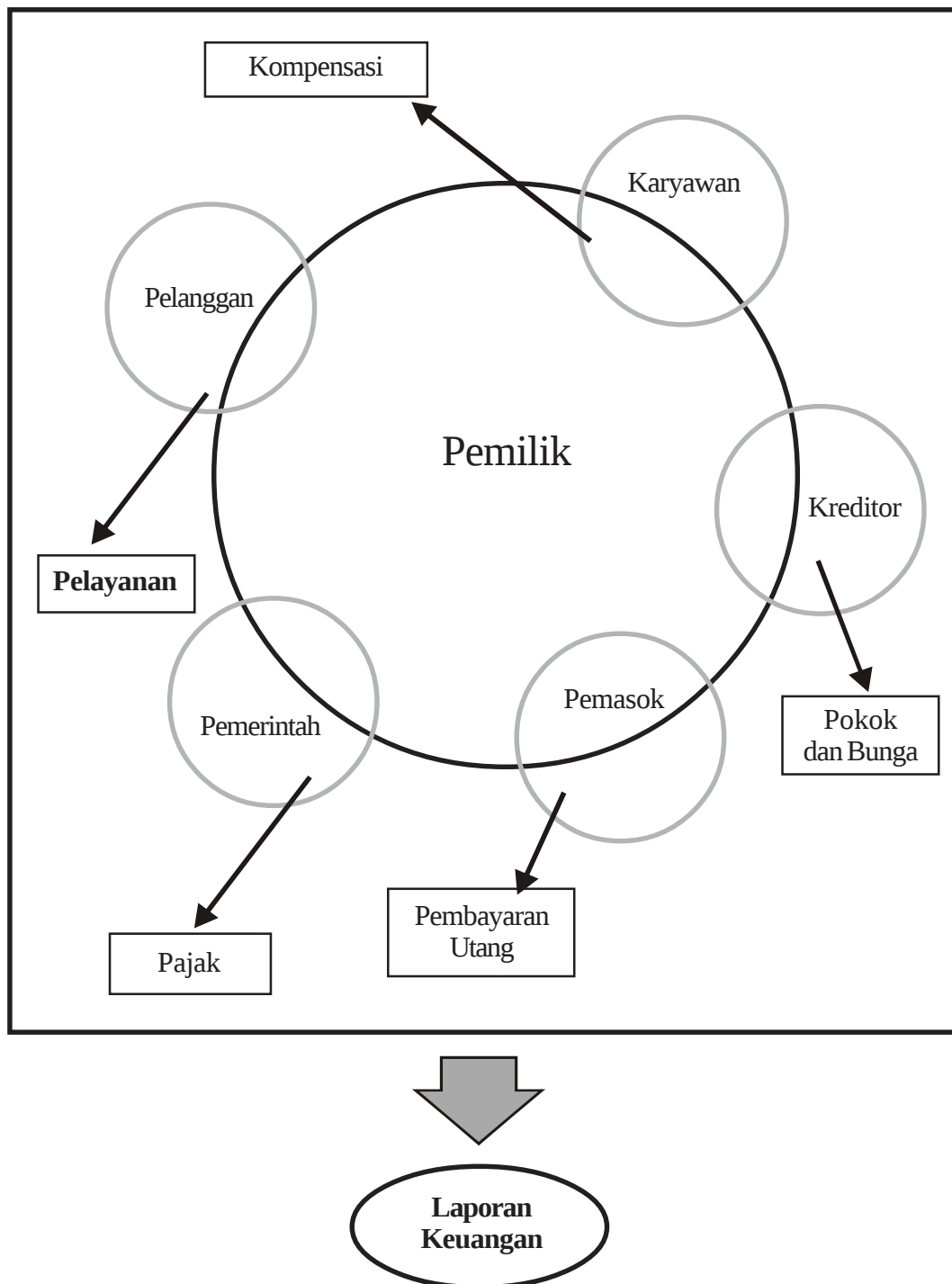
kepentingan perusahaan paling tidak akan bersinggungan dengan kepentingan karyawan yang bekerja sebagai buruh dan kepentingan pelanggan sebagai pemakai barang. Pada situasi sederhana seperti itu maka tanggung jawab perusahaan berkaitan dengan kepentingan karyawan sebagai pekerja yaitu memenuhi kontrak-kontrak kompensasi kepada mereka.

Akuntabilitas pemilik (sebagai realisasi akuntabilitas perusahaan) kepada para karyawan dinyatakan dalam bentuk tanggung jawab untuk melakukan pencatatan segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem pembayaran kompensasi. Misalnya melakukan pencatatan semua data karyawan, pencatatan jam masuk, jam kerja, perhitungan upah dan gaji dan pembayaran kompensasi yang seharusnya mereka dapatkan. Demikian juga pertanggung pelaksanaan akuntabilitas perusahaan kepada pelanggan harus dipenuhi dengan memberikan barang sesuai dengan kualitas yang disepakati, melakukan perhitungan yang jujur dan melakukan pencatatan yang benar dalam utang piutang antara keduanya.

Pada tahap selanjutnya, bila perusahaan berkembang dan pemilik menyerahkan pengelolaan perusahaannya kepada kelompok manajemen, maka tanggung jawab pemilik dan karyawan semakin luas dengan saling memberikan tanggung jawab. Pemilik bertanggung jawab kepada karyawan termasuk manajer mengenai kompensasi, manajer juga bertanggung jawab kepada pemilik atas pekerjaannya.

Persinggungan ini kemudian berkembang dari yang paling sederhana, yaitu dengan karyawan dan pelanggan saja, menjadi lebih rumit dengan munculnya pemasok, investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat umum di perusahaan modern. Dikatakan lebih rumit karena dibandingkan dengan tanggung jawab terhadap karyawan maupun pembeli yang terlibat kontrak secara formal, tanggung jawab kepada masyarakat umum terjadi tidak atas dasar kontrak formal.

Pelaksanaan akuntabilitas perusahaan kepada pihak manapun akhirnya tercermin dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan alat komunikasi antara pihak-pihak dalam perusahaan juga disusun sebagai alat pertanggung jawaban. Gambaran akuntabilitas perusahaan modern yang menghasilkan laporan keuangan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Pertanggung Jawaban Pemilik di Perusahaan Modern

POLITIK EKONOMI

Politik ekonomi mulai dikenal sejak jaman Romawi kuno (Aristoteles) namun secara sistematis dimulai sejak jaman Renaissance (Siswomihardjo, 1999). Ringkasan alur perkembangan politik ekonomi dapat dilacak perubahannya sampai kini. Aliran liberalisme ortodok memandang individu-individu termasuk kepentingan dan perilakunya bersifat fundamental, sedangkan masyarakat dalam pandangan mereka dilihat sebagai kumpulan atau hasil perjuangan kepentingan individu. Politik dianggap sebagai agen tempat kepentingan-kepentingan individu diperjuangkan (Kuntjoro-Jakti, 1999).

Aliran ini dikritik dengan menyatakan bahwa individu terpisah dari masyarakatnya. Para pengkritik justru menyatakan bahwa masyarakatlah yang membentuk perilaku individu. Kepentingan individu sebenarnya merupakan manifestasi kepentingan masyarakatnya. Berdasarkan kepada pandangan liberalisme ortodok dan kritik-kritiknya kemudian dikembangkan paham ekonomi dan politik.

Paham ekonomi menyatakan bahwa proses politik adalah hasil dari proses non-politik. Perbedaan dengan pandangan liberalisme ortodok terletak pada proses politik. Pandangan ortodok menyatakan bahwa proses politik sebagai hasil proses interaksi antar individu, sedang kaum ekonomis menekankan bahwa proses politik sebagai hasil interaksi kekuatan-kekuatan sosial. Kekuatan sosial berupa "class" atau kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok inilah yang membentuk negara sesuai kepentingan mereka.

Paham politik menyatakan bahwa struktur pemerintahan dapat mengembangkan kepentingannya sendiri terlepas dari individu oleh karena itu pemerintah dapat memaksakan kepentingannya kepada kelompok ekonomi tertentu. Paham ekonomi merupakan cikal bakal liberalisme yang kemudian melahirkan negara-negara kapitalis sedangkan paham politik merupakan cikal bakal sosialisme yang kemudian melahirkan negara-negara sosialis. Meskipun kedua paham tersebut mempunyai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat tetapi pendekatan politik ekonomi mereka yang berbeda melahirkan banyak pertentangan.

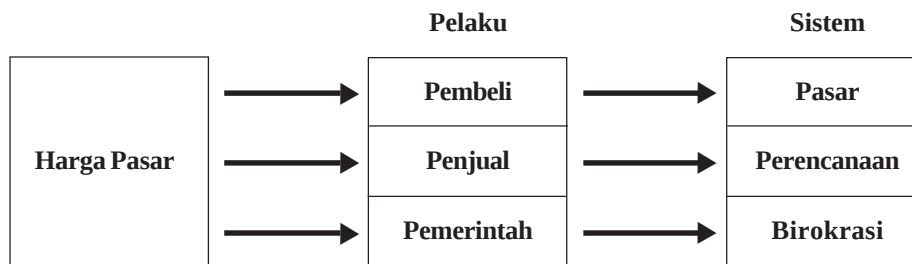
Kedua aliran ini selama berabad-abad hidup sebagai aliran politik ekonomi yang konsisten dengan jalurnya sendiri-sendiri sampai pada akhir abad duapuluh yang memunculkan pluralisme dan difusi antara kedua aliran. Kapitalisme yang "diekspor" melalui kolonialisme ke berbagai belahan dunia kemudian disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat dan berkembang tidak murni lagi. Pada akhir abad duapuluh kapitalisme juga mengadaptasi konsep sosialisme dalam penerapannya. Aliran ini salah memunculkan salah satunya welfare economics. Sosialisme juga mengalami pluralisasi di berbagai tempat yang membebaskan ekonomi pasar pada sebagian pasar produknya. Perhatikan perkembangan terakhir ekonomi Rusia dan Cina.

DISTRIBUSI KEKUATAN EKONOMI

Pola alokasi sumber daya dalam masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem pasar (market system) dan sistem perencanaan (Planning system) (Galbraith, 1973). Pada sistem pasar penjual dan pembeli individual tidak mempengaruhi harga ekuilibrium karena mereka adalah "price taker". Harga relatif stabil kecuali bila terjadi gangguan dari luar pasar misalnya bencana alam, perang atau kerusakan. Dalam sistem pasar, sumber daya atau kekuatan ekonomi secara alami terdistribusi secara merata. Setiap intervensi politis terhadap harga pasti akan mendistorsi alokasi sumberdaya. Demokrasi ekonomi model ini menjadi rusak sejak adanya revolusi industri, yaitu masuknya teknologi dalam proses

produksi. Teknologi hanya layak diterapkan pada industri besar, sehingga masuknya teknologi di perusahaan besar mengakibatkan pecahnya perekonomian menjadi sektor modern dan sektor tradisional. Pada sektor tradisional tetap dapat berlaku persaingan sempurna. Sektor modern yang tidak mampu dijangkau oleh usaha kecil melahirkan penguasa-penguasa pasar baik dalam bentuk monopoli maupun oligopoli. Penguasa-penguasa pasar ini menyebabkan terjadi sistem perencanaan karena harga dapat direncanakan oleh monopoli atau oligopolis.

Bila pemerintah diperhitungkan maka alokasi sumber daya, maka terjadi tiga yaitu sistem pasar, sistem perencanaan dan sistem birokrasi. Dalam jangka panjang sistem perencanaan dan sistem birokrasi akan semakin kuat apalagi terjadi peluang untuk berkolusi antara para penguasa pasar dan birokrat karena sifat-sifat mereka yang sangat institusional (melembaga).



Gambar 2. Pola Alokasi Sumberdaya

KONFLIKDALAMPOLITIKEKONOMI

Umur konflik sama tuanya dengan keberadaan manusia. Kisah putera Adam, Habil dan Qabil merupakan ceritera paling kuna yang menyatakan bahwa konflik perseorangan muncul dari ketidak puasan pembagian sumberdaya. Habil yang tampan dikisahkan tidak puas karena isterinya berwajah jelek, sedangkan saudaranya, Qabil yang berwajah buruk mendapatkan isteri cantik menjadi sumber konflik pribadi. Konflik antar individu dapat membesar menjadi konflik antar grup dan kemudian antar suku. Perang suku pada masyarakat terbelakang yang berlatar belakang pembagian lahan dan air yang sampai kini masih terjadi menjadi buktinya. Setelah terbentuknya negara, pada jaman dahulupun, konflik kepentingan menjadi warna kehidupan. Perang antara kerajaan memperebutkan sumberdaya menjadi bagian sejarah yang selalu muncul.

Pada jaman modern, konflik muncul dengan berbagai bentuk. Dari segi politik ekonomi, pertentangan paham politik dan ekonomi dilanjutkan ke pertentangan negara sosialis dan negara kapitalis. Melalui konsep liberalisme, negara-negara kapitalis eropa melakukan kolonisasi ke berbagai bagian dunia. Pada kurun waktu selanjutnya, kapitalisme telah menjadi komoditi yang diekspor. Pada era setelah perang dunia pertama hingga pertengahan tahun delapan puluhan pertentangan ini dikenal dengan perang dingin.

Konflik sebenarnya tidak hanya terjadi pada blok-blok negara tetapi juga terjadi pada interen bangsa atau negara. Pada setiap negara selalu terjadi konflik antar golongan ekonomi, antar etnik, antar kekuatan politik, kelompok kepentingan dan banyak lagi. Konflik dalam interen negara terjadi karena beberapa hal, pertama karena persaingan. Persaingan memunculkan konflik karena secara

emosional memang potensial memunculkan konflik. Kedua, konflik muncul karena ketidakpuasan. Ketidakpuasan muncul karena secara alami tidak pernah ada kepuasan total. Konflik juga akan muncul adanya regulasi baru yang implementasinya belum dapat diduga. Yang terakhir, konflik dapat muncul akibat sifat keserakahan orang atau sekelompok orang.

Analisis konflik pada masyarakat dapat dilakukan dengan metode induksi dan deduksi. Metode induksi menyatakan bahwa konflik di masyarakat bermuara dari ideologi yang luas. Orang atau sekelompok orang bersedia mati untuk ideologi kelompoknya atau agama yang dianutnya. Konflik di masyarakat hanyalah cerminan dari konflik yang lebih luas. Metode deduksi menyatakan bahwa konflik di masyarakat muncul karena kepentingan pribadi dari masing-masing individu yang diekspresikan ke dalam kelompok. Dari pandangan tersebut maka konflik di masyarakat merupakan cermin dari keinginan para individu. Kelompok kepentingan muncul karena kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan yang mirip. Metode analisis yang baru menekankan bahwa konflik di masyarakat disebabkan berbagai kepentingan termasuk kepentingan ideologi dan individu.

Konflik harus diatasi dengan harapan akan terjadi kolaborasi antara pihak yang bertikai. Secara sederhana konflik dapat diatasi dengan “take and give” atau kesediaan pihak yang bertikai untuk mengorbankan sebagian kepentingannya. Sebagian pakar sosial berpendapat bahwa pemerintah mempunyai legitimasi untuk meredam konflik di masyarakat. Finklestein dan Kinsey (1997) menyatakan sebaliknya ialah bahwa pemerintah sebagai agen untuk meredam konflik sosial sering mengundang pertikaian baru yaitu pertikaian politik. Sebagai prasyarat terjadinya kolaborasi maka dibutuhkan komunikasi yang efektif sebagai medianya.

AKUNTABILITAS PERUSAHAAN DALAM POLITIK EKONOMI

Politik dikatakan sebagai wajah lain dari ekonomi. Kepentingan politik adalah cerminan dari kepentingan ekonomi. Akuntansi tidak dapat dilepaskan dari induknya yaitu ekonomi, sehingga akuntansi terkait erat dengan politik ekonomi. Pemilihan sistem, standar, dan metode akuntansi menunjukkan politik ekonomi yang dianut oleh suatu negara.

Meskipun belum merupakan kecenderungan, penelitian tentang dampak ekonomi dari pemilihan kebijakan akuntansi tampak menonjol dalam beberapa contoh tulisan-tulisan berikut. Holthausen dan Leftwich (1983) yang menguji dampak ekonomi dari pemilihan kebijakan akuntansi terutama pada kontrak yang bernilai besar. Brown dan Steel (1999) meneliti dampak akuntansi kreatif terhadap ekonomi. Kecenderungan tersebut cocok dengan fenomena yang di ketengahkan oleh Hopwood (1983).

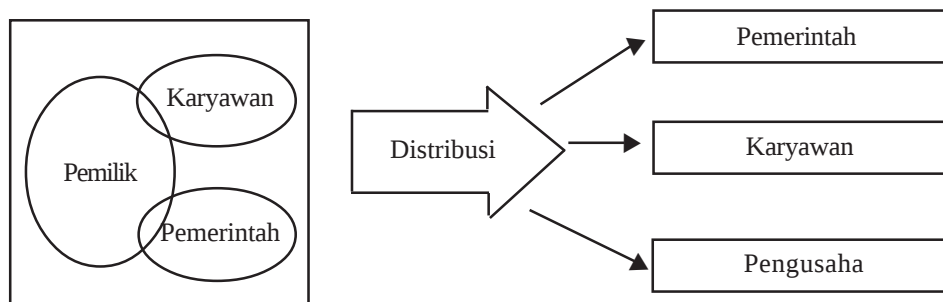
Pemilihan politik ekonomi merupakan pilihan yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku. Pilihan tersebut ada yang merupakan pilihan yang relatif tidak berubah. Negara kapitalis menggunakan politik ekonomi yang berbasis kapitalis, meskipun mungkin paradigmanya berubah. Demikian juga, negara sosialis menggunakan politik ekonomi yang bersifat sosialis. Kadang-kadang ditemukan negara yang umurnya masih muda berubah dari suatu sistem ke sistem lain, atau condong ke suatu sistem ke condong ke sistem lainnya lagi, bahkan silih berganti.

Pandangan akuntansi terhadap politik ekonomi sebenarnya cukup jelas. Akuntansi sebagai alat pasti akan menyesuaikan pekerjaan yang akan dilakukan. Tidak mungkin akuntansi lepas dari konteks politik ekonomi yang dianut. Tugas dan tanggung jawab akuntansi dalam konteks politik ekonomi adalah memenuhi hasrat para pelaku ekonomi dan sekaligus memenuhi kebutuhan informasi

yang menggambarkan distribusi kesejahteraan bagi golongan ekonomi. Penggambaran distribusi ekonomi harus dapat menjadi acuan yang handal oleh karena itu konsep-konsep akuntansi harus terlihat mata rantainya.

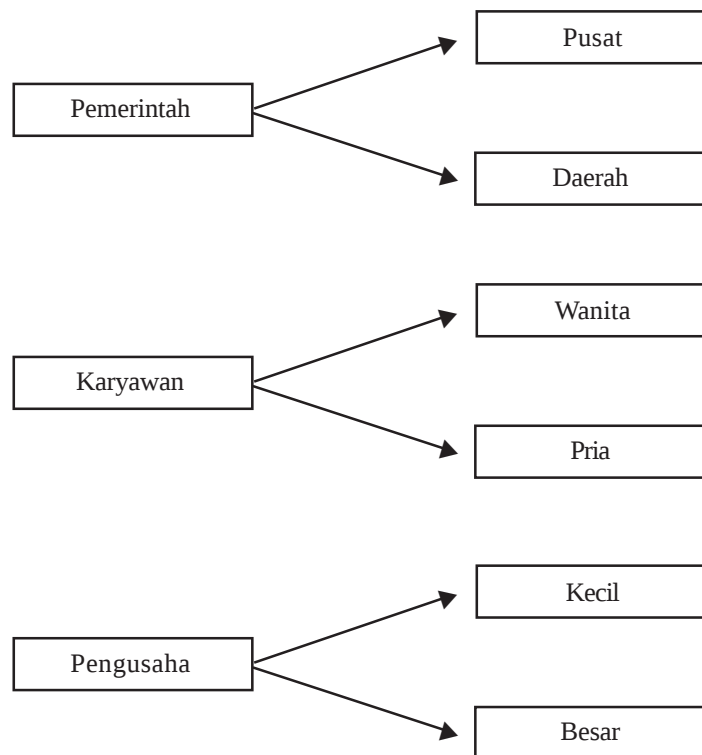
Pada saat ini di banyak negara, konsep akuntansi belum menunjukkan prespektif yang nyata dalam menggambarkan distribusi ekonomi. Akuntansi masih difungsikan sebagai alat para pemilik modal, manajemen, investor dan pihak lain dengan titik berat menunjukkan kemajuan usaha. Ronen (1979) menunjuk fungsi akuntansi sebagai alat untuk memonitor bagi pemilik perusahaan untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan aktiva yang dipercayakan disamping berfungsi sebagai alat untuk memberi informasi kepada pemegang saham dan calon investor.

Kedua fungsi akuntansi di banyak negara, paling tidak sampai tahun sembilan puluhan masih belum berubah, yaitu mendukung kepentingan pemilik dan investor. Informasi yang disediakannyapun terbatas kepada kepentingan pemilik (*stockholder*). Bila fungsi akuntansi dapat memenuhi kepentingan politik ekonomi, maka informasi yang ada pada laporan keuangan harus mengungkap mobilisasi, distribusi dan alokasi sumberdaya dan kesejahteraan kepada masing-masing pihak. Dengan kata lain laporan beroreintasi kepada *stakeholder*, tidak hanya kepada *stockholder*. Pada level pertama sumberdaya dilihat pada kelompok pemerintah karyawan dan pemilik/pengusaha.



Gambar 3. Akuntabilitas Perusahaan Terhadap Politik Ekonomi

Pada level selanjutnya kelompok kepentingan ini, secara nasional harus dapat dihitung pada sub-sub kelompok kepentingan. Untuk pemerintah adalah pemerintah pusat dan daerah, untuk karyawan adalah karyawan pria dan wanita (Hunga, 1999), untuk pengusaha adalah pengusaha besar dan kecil.



Gambar 4. Mobilisasi, Distribusi, dan Alokasi Sumberdaya level 2.

Level selanjutnya masing-masing sub dapat dapat dipecah-pecah lagi pada sektor-sektor bisnis, atau kelompok interes yang lain.

LAPORAN KEUANGAN UNTUK TUJUAN POLITIK EKONOMI

Laporan keuangan perusahaan untuk tujuan politik ekonomi berguna bila digabungkan untuk tingkat daerah atau nasional. Untuk memenuhinya maka perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang bentuk dan susunan memungkinkan untuk digabungkan. Bentuk laporan keuangan mula-mula merupakan laporan keuangan nilai tambah (Value Added) (Sudibyo, 1998). Dari hasil value added yang diperoleh dengan data berbagai maka analisis terhadap mobilisasi, alokasi, distribusi kesejahteraan dapat dilakukan untuk setiap kelompok interes. Misalnya, value added yang diperoleh, masuk ke pemerintah melalui pajak, ke karyawan melalui kompensasi dan pengusaha melalui laba dengan proporsi tertentu. Jumlah semua pembagian ini dapat dialokasikan lagi misalnya untuk pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dengan jumlah yang ditentukan.

Kandungan laporan keuangan bernilai tambah berbentuk sebagai berikut.



Gambar 5. laporan Keuangan Bernilai Tambah

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa simpulan.

1. Akuntansi mempunyai tanggung jawab untuk mendukung akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat dengan menyediakan laporan yang dapat digunakan untuk analisis aspek sosial.
2. Akuntansi dapat menyediakan laporan value added dan sejumlah data tambahan agar analisis terhadap kelompok kepentingan terhadap mobilisasi, distribusi dan alokasi kesejahteraan dapat dilakukan.
3. Bentuk laporan keuangan perusahaan dengan nilai tambah berguna bagi kepentingan politik ekonomi untuk meredam konflik dimasyarakat.

REFERENSI

- Arnold, Patricia, dan Hammond, Theresa (1994). The Role of Accounting in Ideological Conflict: Lessons From The South African Divestment. Movement, *Accounting, Organization and Society*, Vol. 19 no.2, PP.111-126.
- Benston, George J. (1982). Accounting and Corporate Accountability. *Journal Accounting, Organization and Society*, vol.7 no. 2, pp.87-105.
- Brown, Rhoda Pierce dan Steel, Tony. (1999). The Economic of Accounting for Growth. *Accounting and Business Research*, Spring.
- Evan III, John H., dan Patton James H. (1983). An Economic Analysis of Participation in The Municipal Finance Officers Association Certificate of Conformance Program. *Journal of Accounting*

- and Economic*, Vol. 5, pp 151-175.
- Frankelstain, Israel dan Kislev, Joav. (1997). Price Versus Quantities: The Political Perspective. *Journal of Political Economy*, vol 105, no 1.
- Galbraith, John Kenneth. (1972). *The New Industrial State*, Second Edition, New American Library.
- Gray, Rob, Owen, Dave, dan Adams, Carol. (1996). *Accounting and Accountability*, Prentice Hall.
- Goddard, Andrew dan Powell, Jackie. (1994). Accountability and Accounting. Using Naturalistic Methodology to Enhance Organizational Control – A Case Study, Accounting. *Auditing and Accountability Journal*, Vol 7, no. 2, pp.50-69.
- Greening, Daniel W., dan Gray, Barbara. (1994). Testing Model of Organizational response to Social and Political Issues. *Academy of Management Journal*, Vol 37, no.3, pp.467- 498.
- Haryadi. (1998). Ekonomi Politik Pembangunan: Sebuah Ragangan Teoritik. *Jurnal Ilmu Politik*, No.8, Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Gadjahmada.
- Holthausen, Robert W. dan Leftwich, Richard W. (1983). The Economic Consequences of Accounting Choice. *Journal of Accounting and Economics*.
- Hopwood, Anthony G. (1983). On Trying to Study Accounting in The Contexts in Which it Operates. *Accounting, Organizations and Society*, vol.8.
- Hopwood, Anthony G. (1987). The Archeology of Accounting Systems, *Accounting, Organizations and Society*, Vol 12. No3, pp.207-234.
- Hoskin, Keith dan Macve, Richard H. (1995). The Genesis of Accountability : The West Point Connections. *Accounting, Organizations and Society*, Vol.13, no.1, pp37-73.
- Hunga, Arianti I.R. (1999). Perempuan Dalam Perkembangan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Dian Ekonomi Vol.5 No.1 Maret.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (1994). *Standar Akuntansi Keuangan*.
- Indriantoro, Nur. (1999). Aliran-aliran Pemikiran Alternatif Dalam Akuntansi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.4, No.3, 101 –105.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. (1990). Pendekatan Politik Ekonomi (Political-Economy): Jembatan di Antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik. *Jurnal Ilmu Politik*, No. 8, Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Gadjahmada.

- Newman, D. Paul. (1981). An Investigation of The Distribution of Power in The APB and FASB. *Journal Accounting Research*. Vol. 3, Spring, pp. 247-263.
- Lahur, Rufinus.(2000). Makna Perubahan Terhadap Kehidupan Masyarakat Bangsa, Analisis CSIS, XXIX No.1, pp.26-35.
- Sudibyo, Bambang. (1998). Demokratisasi Ekonomi, Distribusi Kekuatan Politiko-Ekonomi, Sosok Demokrasi ekonomi. *Jurnal ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 1998.
- Sudibyo, Bambang. (1987). Kemungkinan Pengembangan Akuntansi Pertanggung Jawaban Sosial di Indonesia. Makalah
- Ronen, Joshua. (1979). The Dual role of Accounting: A Financial Economic Perspective, Handbook of Financial Economic.